



BPFK JAKARTA

LAPORAN KINERJA (LKJ)

2020

Jl. Percetakan Negara No. 23 A Jakarta Pusat 10570 Indonesia
Telepon (021) 4240406, 42882249
Email : kontak@bpfkjakarta.or.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mempunyai tugas melakukan pengamanan fasilitas kesehatan diseluruh sarana prasarana pelayanan kesehatan.

Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja serta sebagai parameter dalam mengukur pencapaian tingkat keberhasilan kinerja pelaksana program dan kegiatan BPFK Jakarta selama tahun anggaran 2020. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Tupoksi di BPFK Jakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap dengan adanya masukan dan umpan balik akan memberi



manfaat dalam proses perbaikan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta di masa mendatang.

Jakarta, 29 Januari 2021

KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS
KESEHATAN JAKARTA,



dr. J. PRASTOWO NUGROHO, MHA.
NIP. 196306121989031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta kepada Direktur Pelayanan Kesehatan, serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta tahun 2020 mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis BPFK 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja. Dari sebelas Indikator kinerja ada empat indikator yang capaiannya melampaui target yaitu Pencapaian Indikator Kinerja yaitu Jumlah ruang lingkup pelayanan 130 dari Target 129, Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki 51 dari Target 30, Persentase pemenuhan kompetensi SDM 80 pegawai dari Target 65, Jumlah sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan 43238 sertifikat/ Laporan Hasil Uji dari Target 35000, Pendapatan PNBK sebesar Rp9.028.708.420,- dari Target Rp8000.000.000).

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target ke lima Indikator dari sebelas indikator diatas adalah melakukan evaluasi dan monitoring, pengalokasian anggaran sesuai kewenangan, penyiapan SDM yang terlatih dan melakukan bimbingan teknis kepada pegawai.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah beberapa pelaksanaan kegiatan terhambat karena adanya wabah **covid-19** sehingga pelaksanaan kegiatan yang diluar kantor dilakukan setelah Semester I, pengalokasian belanja pegawai yang belum sesuai kebutuhan.

Upaya pemecahan masalah yang diusulkan adalah melakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan yang lebih prioritas, pengalokasian belanja pegawai sesuai kebutuhan.

Alokasi anggaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta untuk Tahun 2020 adalah sebesar **Rp.36.977.450.000,-** dengan realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebesar **Rp.29.359.986.039,- atau sebesar (79,40%),** alokasi anggaran bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp30.110.250.000,-,- yaitu Gedung Layanan, Alat Kesehatan, Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Layanan Perkantoran.

Dan kegiatan yang bersumber dari anggaran Non BLU(PNBP) sebesar Rp6.438.000.000,- yaitu untuk Layanan Operasional UPT Non BLU, Obat-obatan dan bahan medis habis pakai dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksklusif	4
Daftar Isi	6
Bab I Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Penjelasan Umum Organisasi	8
C. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	10
D. Aspek Strategis Organisasi serta permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi	11
E. Sistematika Penulisan	12
Bab II Perencanaan & Perjanjian Kinerja	15
II.1 Perencanaan Kinerja	15
II.2 Perjanjian Kinerja	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19-57
A.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	
A.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
A.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
A.4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)	
A.5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.	
A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja	60
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	62
3. Realisasi Anggaran	63-64
4. SK Tim LAKIP	65-67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, senantiasa berusaha melaksanakan sistem kerja pemerintahan secara bijaksana, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Direktur Pelayanan Kesehatan bersama Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, terdiri atas 8 (delapan) sasaran program, yaitu Terwujudnya kepuasan pelanggan, Peningkatan cakupan jenis pelayanan Sarana Prasarana alat yang terakreditasi, Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum, Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta, Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta, Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia sesuai visi dan misi BPFK Jakarta, Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan, Terwujudnya tata kelola keuangan melalui badan layanan umum. Adapun pengukuran kinerja untuk sasaran program tersebut terdiri dari 11 (sebelas) indikator, yaitu:

1. Indeks kepuasan pelanggan.
 - Internal
 - Eksternal
2. Jumlah ruang lingkup pelayanan
3. Penambahan ruang lingkup Akreditasi
4. Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki

5. Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator
6. Persentase peserta uji yg memenuhi persyaratan
7. Persentase pemenuhan kompetensi SDM
8. Jumlah sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan
9. Pendapatan PNB
10. Pemenuhan LAKIP
11. Realisasi anggaran

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020. Di samping merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta di masa yang akan datang.

B. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana,

prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta menyelenggarakan fungsi :

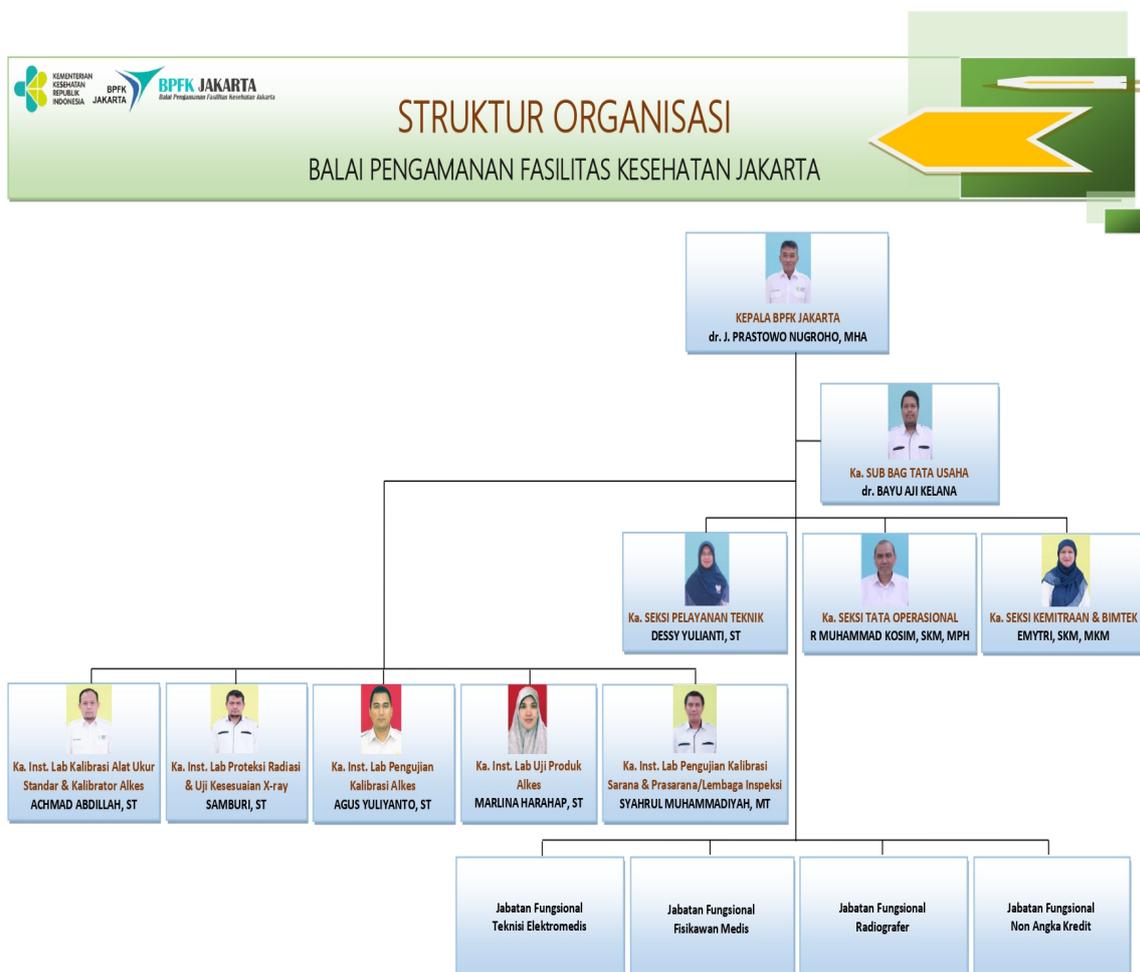
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
3. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
4. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
5. Pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
6. Pengukuran luaran radiasi terapi;
7. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;
8. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan
9. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pengamanan fasilitas kesehatan;
11. Pengelolaan data dan sistem informasi;
12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
13. Pelaksanaan urusan administrasi BPFK

Susunan organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta sebagai berikut :

1. BPFK Jakarta Tipe A;
2. Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, urusan

- kepegawaian, organisasi tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BPFK;
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :



C. Aspek Setrategis Organisasi serta Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi

1. Aspek strategis organisasi pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta antara lain :
 - a. Memberikan pelayanan kalibrasi alat ukur yang ada di Laboratorium kalibrasi swasta, laboratorium internal di Rumah Sakit dan Laboratorium kalibrasi di Dinas Propinsi dan Kabupaten Kota.
 - b. Membina balai pengujian fasilitas kesehatan dan Institusi Penguji swasta, laboratorium kalibrasi internal rumah sakit dan laboratorium kalibrasi di dinas propinsi dan kabupaten kota di wilayah binaan yang sudah ditetapkan pemerintah.
 - c. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi dan proteksi radiasi sesuai dengan standar dan menjangkau seluruh fasyankes.
 - d. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui uji produk alat kesehatan.
 - e. Mewujudkan tata kelola institusi yang bersih, modern dan bertanggungjawab.

2. Isu Strategis yang sedang dihadapi organisasi adalah :
 - a. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
 - b. Menjadi rujukan nasional dalam pengujian kalibrasi peralatan kesehatan ditengah beragamnya standar acuan dalam pengujian kalibrasi alat kesehatan. Apalagi jumlah institusi penguji swasta terus meningkat.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPFK untuk mampu mengoptimalkan

pelayanan pengujian/kalibrasi, proteksi radiasi dan inspeksi diseluruh fasyankes.

- d. Perkembangan teknologi kesehatan yang menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) BPFK untuk terus meningkatkan kompetensinya.
- e. Jumlah fasyankes yang terus meningkat sehingga konsumen yang dilayani juga meningkat.
- f. Meningkatnya jumlah alat kesehatan setiap tahun akan meningkatkan juga permintaan pelayanan kalibrasi.
- g. Memenuhi kebutuhan peralatan dan standar acuan untuk uji dan kalibrasi.
- h. Memenuhi permintaan uji produk alat kesehatan produksi dalam negeri.
- i. Perencanaan perubahan sistem pengelolaan keuangan dari Non BLU menjadi sistem pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

D. Sistematis

Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta tahun 2020 ini menjelaskan pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta selama tahun 2020, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan satu tahun.

Dari analisis atas capaian kinerja diharapkan dapat diidentifikasi berbagai informasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan demikian Sistematis penyajian Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issud*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta capaian langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Dalam rencana kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta tahun 2020, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPFK Jakarta dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Visi dan Misi, adapun Visi dan Misi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :

Visi :

“Menjadi institusi pengujian fasilitas kesehatan rujukan nasional dengan pelayanan prima”

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi BPFK Jakarta yang menggambarkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPFK Jakarta. Adapun misi BPFK Jakarta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi dan proteksi radiasi sesuai dengan standar dan menjangkau seluruh fasyankes di propinsi-propinsi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Membina balai pengujian fasilitas kesehatan dan Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan.

3. Mewujudkan tata kelola institusi yang bersih, modern dan bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta melaksanakan perencanaan kinerja melalui proses penetapan kinerja dalam satu tahun anggaran 2020, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Sasaran strategis dan program indicator kinerja utama yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BPFK JAKARTA TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SA TU AN	TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)								
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	1.1	Indeks kepuasan pelanggan							
			- Internal	%	68	68.5	69	69.5	70	
			- Eksternal	%	74	75	76	77	78	
2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	2.1	Jumlah ruang lingkup pelayanan		129	133	137	141	145	
			2.2	Penambahan ruang lingkup Akreditasi		54	58	62	66	70
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	3.1	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki		30	33	36	39	41	
4	Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta	4.1	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator		55	60	65	70	75	
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	5.1	Persentase peserta uji yg memenuhi persyaratan	%	50	55	60	65	70	
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	6.1	Persentase pemenuhan kompetensi SDM	%	65	75	85	95	105	
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	7.1	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan		35000	40000	42000	45000	48000	
8	Terwujudnya tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	8.1	Pendapatan PNB		8 M	9.5 M	10 M	10.5 M	11 M	
			8.2	Pemenuhan LAKIP		95	95	95	95	95
			8.3	Realisasi Anggaran		100	100	100	100	100

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta menyusun perjanjian kinerja tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Target kinerja ini menjadi komitmen Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta untuk mencapainya dalam tahun 2020.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	1.1	Indeks kepuasan pelanggan	
			- Internal	68 %
			- Eksternal	74 %
2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	2.1	Jumlah ruang lingkup pelayanan	129
		2.2	Penambahan ruang lingkup Akreditasi	54
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	3.1	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	30
4	Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta	4.1	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	55 %
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi penguji pemerintah dan swasta	5.1	Persentase peserta uji yg memenuhi persyaratan	50 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	6.1	Persentase pemenuhan kompetensi SDM	65 %
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	7.1	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan	35000
8	Terwujudnya tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	8.1	Pendapatan PNBP	8 M
		8.2	Pemenuhan LAKIP	95
		8.3	Realisasi Anggaran	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

KPI.1 Indeks kepuasan pelanggan

adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan dalam memperoleh pelayanan dari BPFK Jakarta.

- a. Formula Perhitungan Kepuasan Internal, pada tahun 2020 target yang ditetapkan 68%.
- b. Formula Perhitungan Kepuasan Eksternal mengacu kepada permenPANRB no 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat, pada tahun 2020 target yang ditetapkan adalah 74%.

Tabel KPI.1

Indeks Kepuasan Pelanggan (Internal dan Eksternal)

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2020	2020
KPI.1	Indeks kepuasan pelanggan			
	a. Internal	Kasi Tata Operasional	68	65
	b. Eksternal	Kasi Tata Operasional	75	83

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini :
Target indikator kinerja Indeks Kepuasan pelanggan dan realisasi kinerja terdiri dari :
 - a. Internal 68, dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 65 dari 100 responden.
 - b. Eksternal 74 75, dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 83 dari 134 responden

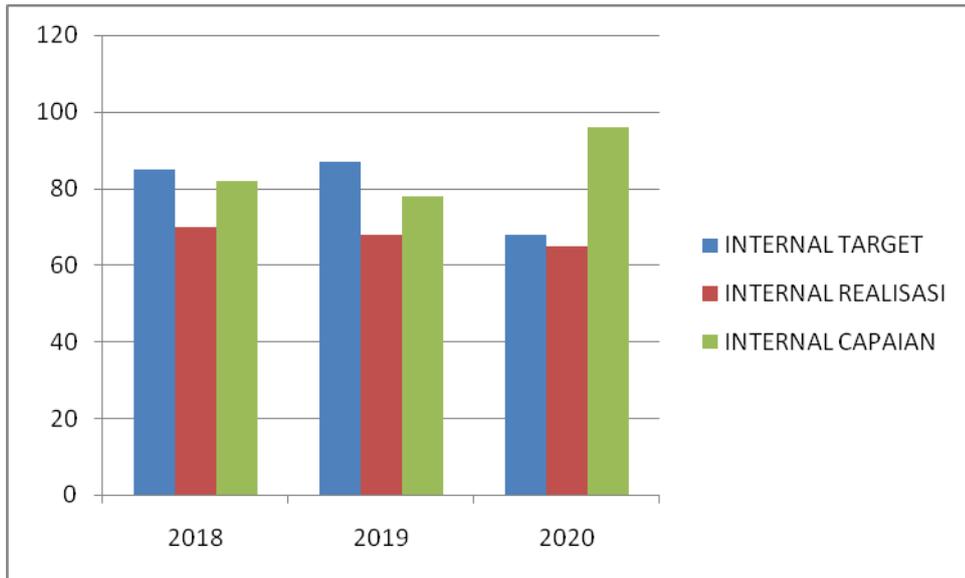
Dari target indeks kepuasan pelanggan internal dan indeks kepuasan eksternal yang tersebut diatas, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator adalah **BAIK**.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

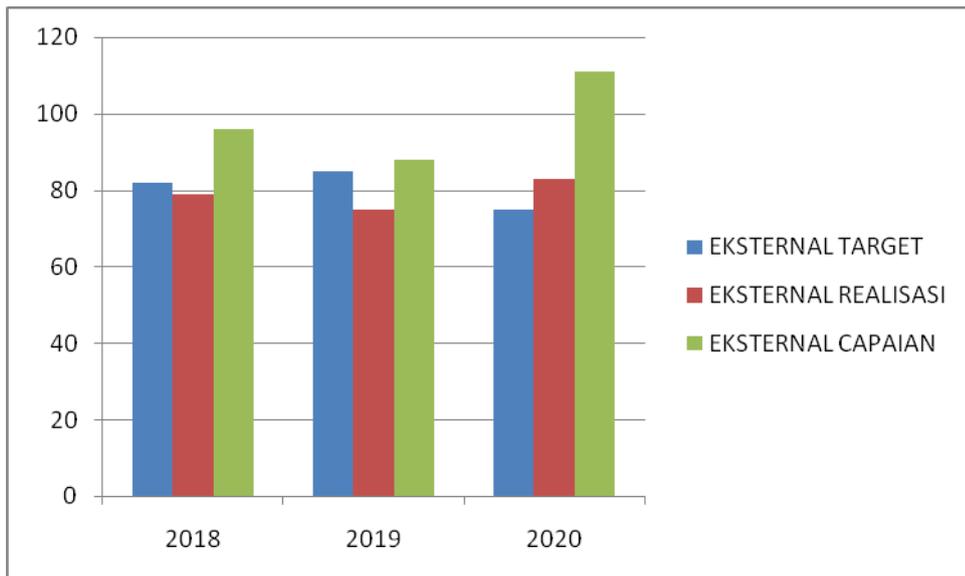
No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KPI.1	Indeks kepuasan pelanggan										
	a. Internal	Kasi Tata Operasio nal	85	87	68	70	68	65	82%	78%	96%
	b. Eksternal	Kasi Tata Operasio nal	82	85	75	79	75	83	96%	88%	111 %

Realisasi kinerja indeks kepuasan pelanggan internal Tahun 2020 sebesar 65, Tahun 2019 sebesar 68 dan Tahun 2018 sebesar 70 sedangkan capaian indeks kepuasan pelanggan internal Tahun 2020 sebesar 96%, Tahun 2019 sebesar 78% dan Tahun 2018 sebesar 82% dan capaian indeks kepuasan pelanggan eksternal Tahun 2020 sebesar 111%, Tahun 2019 sebesar 88% dan Tahun 2018 sebesar 96%.

Grafik, Indeks Kepuasan Internal



Grafik, Indeks Kepuasan Eksternal



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.
4. Realisasi Indeks Kepuasan Internal pada Tahun 2020 sebesar 65 dan realisasi Tahun 2019 sebesar 68 sedangkan realisasi indeks kepuasan pelanggan eksternal pada tahun 2020 sebesar

75 dan realisasi tahun 2019 sebesar 83, sehingga terjadi pencapaian masing-masing sebesar 111% dan 88%.

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Berdasarkan Nilai Interval Konversi IKM pada Permen PAN RB No 14 tahun 2017 tentang indeks kepuasan masyarakat (pelanggan eksternal) yang bisa dibandingkan yaitu 76,61 – 88,30 mendapat nilai mutu pelayanan B.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa capaian kinerja untuk indeks kepuasan pelanggan internal dan eksternal yaitu ;

- 100 pegawai BPFK Jakarta menyatakan kepuasan tertinggi pada variabel penugasan pekerjaan dan kepuasan terendah pada variabel supervisi dan imbalan.
- 134 pelanggan menyatakan kepuasan tertinggi pada unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur namun terdapat penilaian rendah pada unsur biaya dan tarif serta waktu penyelesaian.

Alternatif Solusi :

- Mengevaluasi kebijakan supervisi pada pegawai BPFK Jakarta, konsistensi penerapan penghargaan kenaikan pangkat dan jabatan sesuai ketentuan tentang kenaikan pangkat dan jabatan sehingga pegawai mendapatkan imbalan/tunjangan kinerja sesuai dengan Pendidikan, masa kerja, dan tanggung jawab pekerjaan.
- Melakukan monitoring pemenuhan waktu pelayanan dan integrasi pelaporan, melakukan komunikasi prosedur pelayanan melalui website dan kegiatan antara lain :

Monitoring dan evaluasi pelayanan, Kaji ulang, Audit Internal dan Temu Pelanggan.

7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Survey pengambilan data secara langsung atau menggunakan media elektronik dan analisa dilakukan oleh staf seksi Tata Operasional

8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kepuasan pegawai internal perlu ditunjang dengan pengelolaan kepegawaian yang optimal, rapat berkala internal dan peningkatan kapasitas SDM serta kepuasan pelanggan BPFK Jakarta perlu ditunjang oleh pertemuan pelanggan, integrasi pelaporan dan monitoring evaluasi pelayanan serta peningkatan jejaring kerja antar laboratorium.

KPI. 2 Jumlah ruang lingkup pelayanan

Adalah akumulasi Jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh BPFK Jakarta yang meliputi kalibrasi, inspeksi, uji kesesuaian, TLD, film badge, pelatihan teknis dan non teknis, uji kompetensi, uji produk dan uji profisiensi.

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 129 pelayanan.

Tabel KPI. 2
Jenis Ruang Lingkup Pelayanan

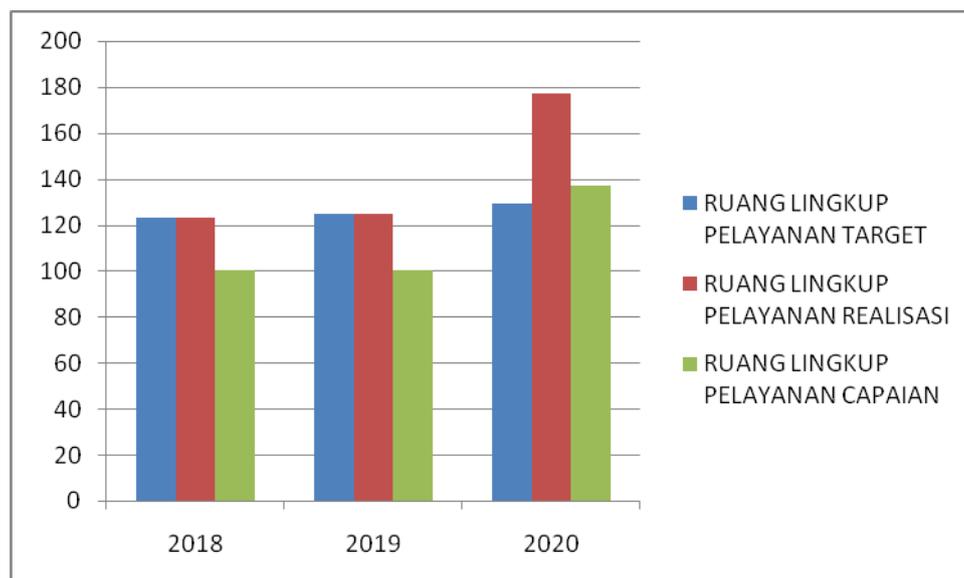
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2020	2020
KPI. 2	Jenis ruang lingkup pelayanan	Kasi Tata Operasional	129	177

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 129 dan realisasi kinerja sebesar 177, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja penambahan jenis ruang lingkup pelayanan **Sangat Baik**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KPI. 2	Jenis ruang lingkup pelayanan	Kasi Tata Operasional	123	125	129	123	125	177	100%	100%	137%

3. Realisasi kinerja jenis ruang lingkup pelayanan Tahun 2020 sebesar 177 jenis alat, Tahun 2019 sebesar 125 jenis alat dan Tahun 2018 sebesar 123 jenis alat. Sedangkan capaian Tahun 2020 sebesar 137%, Tahun 2019 sebesar 100% dan Tahun 2018 sebesar 100%.

Grafik, Jumlah Ruang lingkup pelayanan



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 177 dengan target jangka menengah pada rencana strategis tahun 2020 sebesar 125 terdapat peningkatan sebesar 37%.
5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja yaitu :
 1. Tersedianya Sumber daya yang kompeten.
 2. Penambahan pelayanan uji produk, uji profisiensi dan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dan alat ukur.
7. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 - a. Mudah mendapatkan akses informasi dokumen standar
 - b. Narasumber dari luar yang professional mudah diakses.
 - c. Kemampuan dari sumber daya pelaksana yang berpengalaman.
 - d. Alokasi dana untuk menunjang kegiatan ini sebesar Rp232.868.000,- realisasi sebesar Rp228.171.242,- atau 97,98%.

8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Terdapat kegiatan penyusunan dan uji coba metode serta pengadaan peralatan alat ukur.

KPI.3 Penambahan ruang lingkup yang terakreditasi

Adalah jumlah jenis pelayanan yang terakreditasi sesuai persyaratan yang diberikan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang memberikan akreditasi.

Target yang ditetapkan Tahun 2020 adalah 54 %

Tabel KPI.3
Penambahan ruang lingkup yang terakreditasi

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2020	2020
KPI.3	Penambahan ruang lingkup yang terakreditasi	Kasi Tata Operasional	54	0

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan 54 dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 0, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator ini tidak tercapai
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KPI.3	Penambahan ruang lingkup yang terakreditasi	Kasi Tata Operasional	1	1	1	1	3	0	100%	300%	0

Realisasi penambahan ruang lingkup yang terakreditasi tahun ini 0 dan realisasi tahun 2019 ada 3 lingkup dan capaian kinerja tahun ini sebesar 0% dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 300%, maka dapat di nyatakan tidak ada perkembangan atau menurun.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi kinerja tahun 2020 jumlah akreditasi 0 sehingga tidak dibandingkan dengan target jangka menengah.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Analisa penyebab kegagalan capaian kinerja yaitu :

Adanya pandemi covid19 dan kebijakan KAN pada awal pandemi menyatakan bahwa KAN tidak membuka penambahan ruang lingkup akreditasi, kecuali survailen/akreditasi yang sudah terjadwal.

Alternatif Solusi :

1. BPFK Jakarta hanya melaksanakan kegiatan Survailen terjadwal untuk 2 laboratorium yaitu Lab. Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Preofisiensi.
 2. Penambahan ruang lingkup akan dijadwalkan pada tahun 2021, sesuai dengan ketetapan KAN.
5. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
1. Pelaksanaan kegiatan harus berazaskan kepada kewajaran,transparansi, dan efisiensi serta pembiayaan mengacu pada standar biaya umum (SBU)
 2. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp168.540.000,- dan realisasi sebesar Rp30.425.000,- atau 18.05%.
6. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- Kebutuhan untuk Jaminan pelayanan sesuai dengan Permenkes no 54 tahun 2015 dan Standar Nasional Indonesia serta kepercayaan pelanggan pada Lembaga yang terakreditasi.
- Adanya pandemi covid-19 dan kebijakan KAN yang menyatakan tidak ada penambahan ruang lingkup akreditasi pada awal Pandemi menyebabkan tidak ada penambahan ruang lingkup akreditasi.

KPI.4 Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki

Adalah jumlah prosedur operasional dan SOP-AP yang dibuat dan atau diperbaiki dalam kurun waktu satu tahun.

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 30 SOP.

Tabel KPI.4
Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki

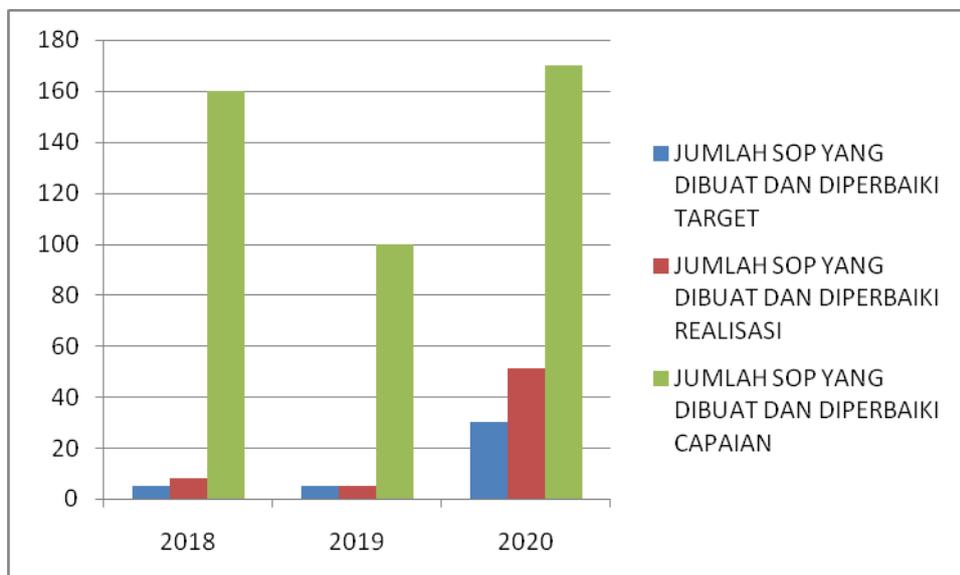
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2020	2020
KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Kasi Tata Operasional	30	51

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja tahun ini sebesar 30 SOP dan realisasi kinerja tahun ini 51 SOP, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indicator itu **Sangat Baik** tingkat efektifitas ini dapat ditunjukkan dengan sudah dilakukan perbaikan pada Sistem Operasional Prosedur (SOP).
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Kasi Tata Operasional	5	5	30	8	5	51	160%	100%	170%

Realisasi jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki tahun ini sebanyak 51 dan tahun 2019 sebanyak 5 dengan capaian Tahun 2019 sebesar 100%, Tahun 2018 sebesar 160% dan Tahun 2020 sebesar 170%, maka dapat dinyatakan ada yang melebihi target atau sesuai target mengikuti kebutuhan pada tahun berjalan.

Grafik, Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki



3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
5. Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan :

1. Perbaiki SOP sesuai kebutuhan proses atau standar dan tindakan perbaikan dari audit
 2. Perbaiki SOP rutin minimal 2 tahun merupakan prosedur pengendalian dokumen
7. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 1. Penggunaan anggaran sesuai Standar Biaya Umum

2. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp529.884.000 dan realisasi sebesar Rp506.939.442,- atau 95,66%
8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu
 1. Kegiatan kaji ulang dokumen dan pemeliharaan akreditasi berkala
 2. Kegiatan pembuatan dan revisi metode Kerja

KPI.5 Tingkat Keandalan alat ukur dan kalibrator

Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator atau Overall Equipment Effectiveness (OEE) adalah hasil pengukuran kehandalan alat ukur dan kalibrasi tertentu yang dilihat dari 3 aspek yaitu : ketersediaan, kinerja dan kualitas.

- a. Ketersediaan (availability) : Ke, adalah perbandingan jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari alat tsb direncanakan beroperasi.
- b. Kinerja (performance) : Ki, adalah kemampuan alat yang ada dibagi kemampuan ideal alat
- c. Kualitas (quality) : Ku, adalah keluaran yang baik yang dihasilkan oleh suatu alat dibagi dengan total keluaran dari alat tersebut

Peralatan yang akan dilakukan penilaian minimal peralatan pengujian kalibrasi dan inspeksi yang bernilai ≥ 200 jt dan atau masuk dalam lingkup akreditasi

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 55%.

**Tabel KPI.5
Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Jadwal**

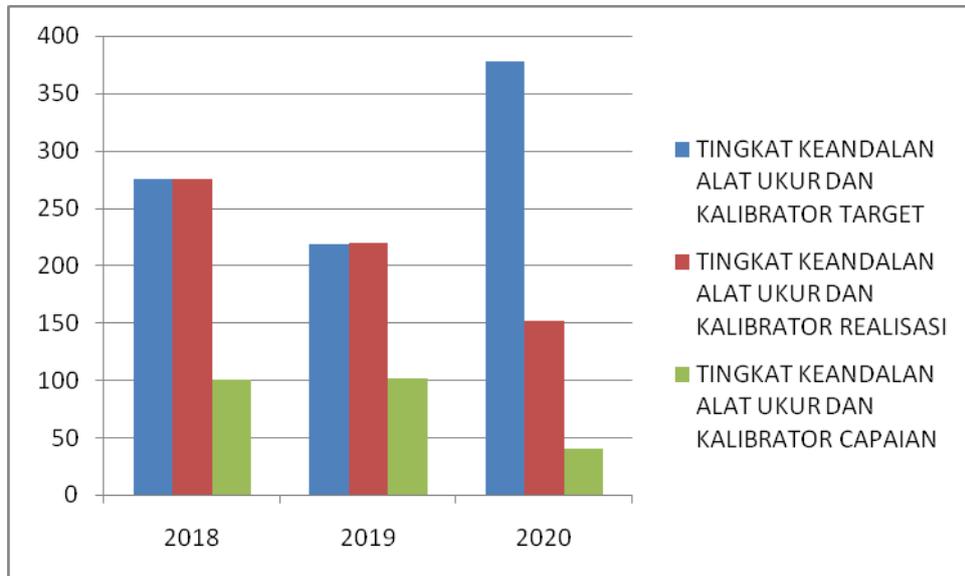
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2020	2020
KPI.5	Tingkat Keandalan alat ukur dan kalibrator	Kasi Tata Operasional	374	151

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
 Target kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 374 alat dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 151 alat, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indicator menurun.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KPI.5	Tingkat Keandalan alat ukur dan kalibrator	Kasi Tata Operasional	275	218	378	275	220	151	100%	101%	40,37%

Realisasi kinerja Tahun 2020 sebesar 151 alat, Tahun 2019 sebesar 220 alat dan Tahun 2018 sebesar 275, sedangkan capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 40,37%, Tahun 2019 sebesar 101% dan Tahun 2018 sebesar 100%, maka dapat dinyatakan ada perkembangan kinerja yang telah meningkat

namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19.



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 sebesar 151 alat dengan target jangka menengah pada rencana strategis BPFK terjadi penurunan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab kegagalan :

- a. Alat Ukur masih dipakai pelayanan di Fasyankes
- b. Keterbatasan penyedia kalibrasi alat ukur antara lain Layanan SNSU BSN dan Lab Kalibrasi alat standar membatasi volume pada awal pandemi.

- c. Terbatasnya anggaran kalibrasi.
- 6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 - 1. Penggunaan Laboratorium Kalibrasi AUS BPFK Jakarta sesuai kemampuan
 - 2. Seleksi Pemilihan penyedia kalibrasi pada instansi pemerintah misal BATAN, SNSU BSN, Dit.Metrologi
 - 3. Peralatan yang tidak dapat dilakukan recalibrasi yang tidak ada penyedia, maka dilakukan verifikasi terhadap alat sejenis.
 - 4. Anggaran Pemeliharaan Alat Pengujain Kalibrasi sebesar Rp951,203,000 telah direalisasi sebesar Rp917,209,926 (96.42%)
- 7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 - 1. Kegiatan yang menunjang : pengecekan antara dan pertemuan teknis antar laboratorium
 - 2. Koordinasi antara jadwal recalibrasi dengan jadwal pelayanan BPFK Jakarta

KPI.6 Prosentase peserta uji yang memenuhi persyaratan
 Adalah persentase peserta uji profisiensi yang melakukan pengambilan data dan menyerahkan hasil.
 Target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 50%.

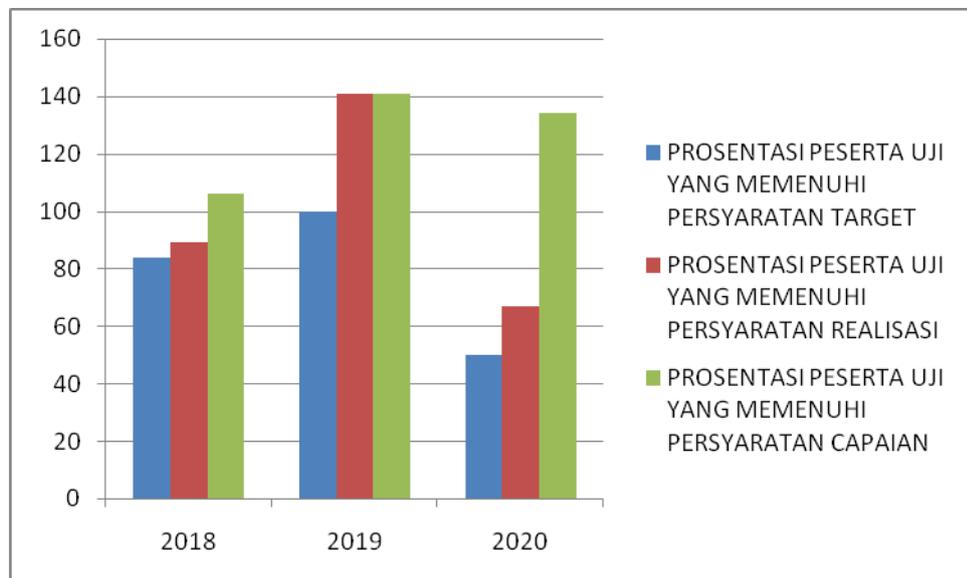
Tabel KPI.6
Prosentase Peserta Uji yang memenuhi persyaratan

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2020	2020
KPI.6	Prosentase peserta uji yang memenuhi persyaratan	Kasi Bimbingan Teknis dan Kemitraan	50%	91%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 50% dan realisasi kinerja sebesar 91%, maka dinyatakan bahwa pencapaian berdasarkan indicator kinerja itu **Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KPI.6	Prosentase peserta uji yang memenuhi persyaratan	Kasi Bimbingan Teknis dan Kemitraan	84%	100%	50%	85%	96%	91%	101%	96%	182%

Grafik, Prosentase peserta uji yang memnuhi persyaratan



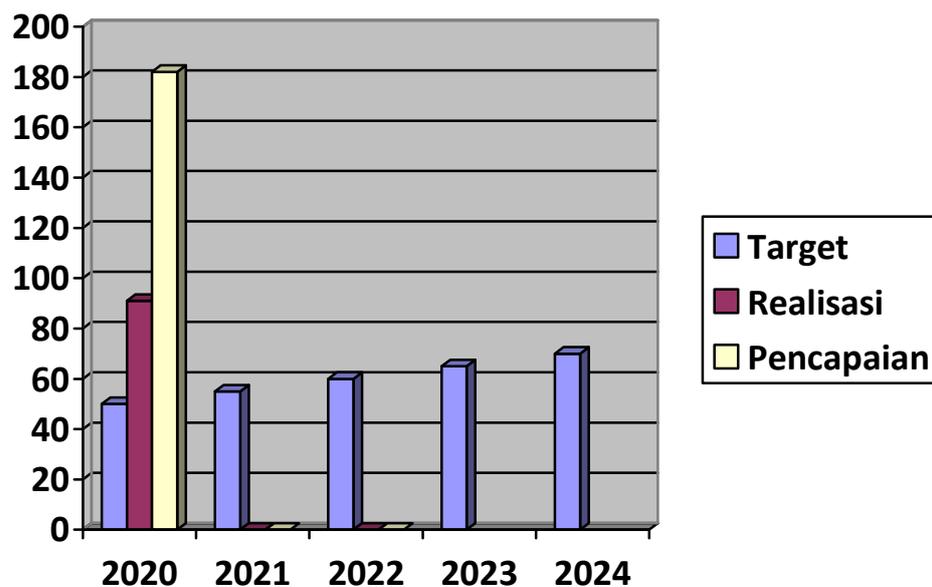
3. Jika realisasi indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 182% dan tahun 2019 sebesar 96%, 2018 sebesar 101%. Maka dapat dinyatakan ada peningkatan dalam persentase capaian tahun 2020, Pemenuhan

persyaratan Peserta UP adalah 93 % dan Bimbingan Teknis Institusi Penguji sebesar 89% salah satu faktornya adalah bertambahnya institusi penguji Alkes di wilayah kerja BPFK Jakarta dan rendahnya target kinerja tahun 2020

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah capaian tahun ini mencapai 91%, telah melampaui target jangka menengah sebesar 65%.

Grafik Persentase Peserta Uji yang memenuhi persyaratan



5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Belum ada target secara nasional yang ditargetkan oleh regulator dalam hal ini Ditjen Pelayanan Kesehatan. Namun berdasarkan Permenkes 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi Alkes, yaitu menyebutkan Uji Profisiensi (UP) salah

satu jaminan mutu untuk laboratorium Pengujian dan Kalibrasi saat ini BPFK Jakarta telah sebagai Penyelenggaraan UP. Adapun sebagai institusi pengujian Alat Kesehatan kelas A BPFK Jakarta juga melakukan pendampingan, pelatihan, advokasi, dan penelitian/bimbingan teknis.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Analisis penyebab keberhasilan mendekati angka 100% pada indikator ini yaitu :

Pemenuhan persyaratan Komite Akreditasi Nasional dan regulasi untuk kewajiban Institusi Penguji / Laboratorium kalibrasi untuk mengikuti Uji Profisiensi dan Bimbingan Teknis (Berdasarkan Permenkes No 54 tahun 2015)

7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Kolaborasi antara Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis dengan Seksi Tata Operasional serta personel Laboratorium BPFK Jakarta dalam penyelenggaraan Uji Profisiensi dan selama pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pada institusi penguji.

2. Alokasi anggaran dalam DIPA Bimtek sebesar Rp440.912.000,- realisasi sebesar Rp426.266.089,- atau 96,68%.

8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja adalah BPFK Jakarta telah terakreditasi PUP 020-IDN, Personel teknis BPFK Jakarta telah memiliki kompetensi , Memiliki kerjasama dengan Jejaring Kerja dengan institusi penguji dan Sosialisasi kegiatan sebelum waktu pelaksanaan melalui website resmi BPFK Jakarta.

KPI.7 Prosentase pemenuhan kompetensi SDM

Adalah persentase SDM yang memperoleh sertifikat kompetensi dibidangnya

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 65%

Tabel KPI.7
Prosentase Pemenuhan Kompetensi SDM

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2020	2020
KPI.7	Persentase pemenuhan kompetensi SDM	Kasi Bimbingan Teknis dan Kemitraan	65%	72 %

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja tahun ini sebesar 65% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 72%, maka dinyatakan bahwa target berdasarkan indicator ini **Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

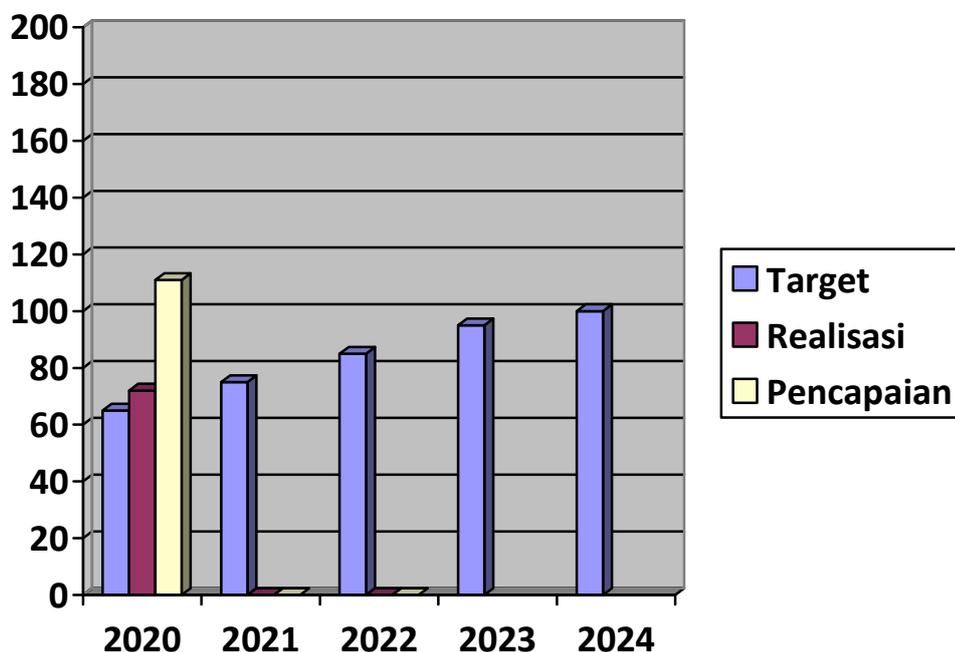
No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KPI.7	Persentase pemenuhan kompetensi SDM	Kasi Bimbingan Teknis dan Kemitraan	80%	100%	65%	84%	93,4%	72%	106%	93,4%	111%

Adapun realisasi indicator kinerja dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 sebesar 111% dan tahun 2019 sebesar 93,4% serta tahun 2018 sebesar 106%, maka dapat dinyatakan ada perkembangan kenaikan kinerja yang signifikan sebesar 18%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah ada kekurangan sekitar 28%. Target jangka menengah 100%, sedangkan realisasi pada tahun ini 72%.

Grafik Persentase pemenuhan kompetensi SDM



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Untuk mendukung misi pemerintah tahun 2020-2024 yaitu Peningkatan Kualitas Indonesia dan Misi Kemenkes yaitu Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan serta sesuai dengan UU ASN No. 5 Tahun 2014, merujuk pada PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Setiap pegawai Negeri Sipil minimal 20 JPL/tahun wajib mendapatkan pendidikan/pelatihan dalam setiap PNS di BPFK

Jakarta harus mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi. Maka realisasi kinerja 72% belum mencapai target secara nasional yaitu 100%.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - Analisa penyebab keberhasilan :
 1. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan kompetensi telah sesuai dengan perencanaan.
 2. Ketersediaan alokasi anggaran sesuai kebutuhan
 3. Tercapainya SDM yang kompeten dibidangnya.
 4. Penyelenggaraan Uji Kompetensi a Internal
 - Adapun solusi peningkatan pencapaian kinerja adalah
 1. Melakukan kegiatan pelatihan yang terakreditasi
 2. Membangun jaringan kemitraan dengan stakeholder penyelenggara pelatihan.
 3. Penunjukan BPFK Jakarta sebagai Tempat Uji Kompetensi
 - Analisa kendala :
 1. Beberapa staf tidak diusulkan oleh kepala Laboratorium dan unit kerja untuk mengikuti program pelatihan
 2. Kurangnya monitoring dari seksi kemitraan dan Bimtek terhadap staf yang belum kompetensi
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 1. Efisiensi biaya pelatihan dilakukan dengan mengubah pelatihan menjadi inhouse training sehingga menghilangkan biaya perjalanan dinas dan menambah jumlah kuota peserta pelatihan tanpa harus menambah biaya pelatihan.
 2. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp1.512.119.000 terealisasi sebesar Rp1.077.142.632,- atau sebesar 71,23%.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- Keberhasilan indikator ini ditunjang oleh Program / kegiatan yaitu :
 1. Membangun Jejaring Kemitraan dengan Badan Standar Nasional / Laboratorium SNSU, Instansi Pendidikan, Bapelkes, PT Sucofindo antara lain melalui kerjasama/MOU
 2. Penunjukan BPFK Jakarta sebagai tempat uji Kompetensi Koordinasi antara seksi kemitraan dan bimtek dengan unit kerja lainnya dalam merencanakan pelatihan.
 - Kegagalan rendahnya pencapaian realisasi anggaran yaitu :
 1. Penyelenggara pelatihan dan sertifikasi dari eksternal Membatasi jumlah kegiatan karena protokol kesehatan.
 2. Perubahan metode pelatihan pembelajaran jarak jauh/daring mengurangi biaya perjalanan dinas
 3. Perubahan lokasi peningkatan kapasitas SDM semula menggunakan transportasi udara (jarak jauh) menjadi transportasi darat (dekat)
 4. Benturan jadwal pelatihan internal dengan jadwal pelayanan karena penundaan waktu akibat pandemi.
 - Rencana Tindak lanjut adalah melakukan :
 1. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan serta kerjasama dengan organisasi profesi instansi lain misal IKATEMI, BATAN dan BAPETEN
 2. Melakukan pelatihan yang terakreditasi dengan Pengampuan Pelatihan dengan Bapelkes
 3. Koordinasi seksi kemitraan dan bimtek dengan unit terkait lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan agar tercapainya pelatihan yang sesuai kompetensi dan sesuai kebutuhan.

KPI.8 Jumlah Sertifikat /Laporan Hasil yang diterbitkan

Adalah Jumlah sertifikat/laporan hasil uji pelayanan BPFK Jakarta, kalibrasi, inspeksi, uji kesesuaian, TLD, film badge, pelatihan teknis dan non teknis, uji kompetensi , uji produk dan uji profesiensi yang diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun.

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 35000.

Tabel KPI.8
Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan

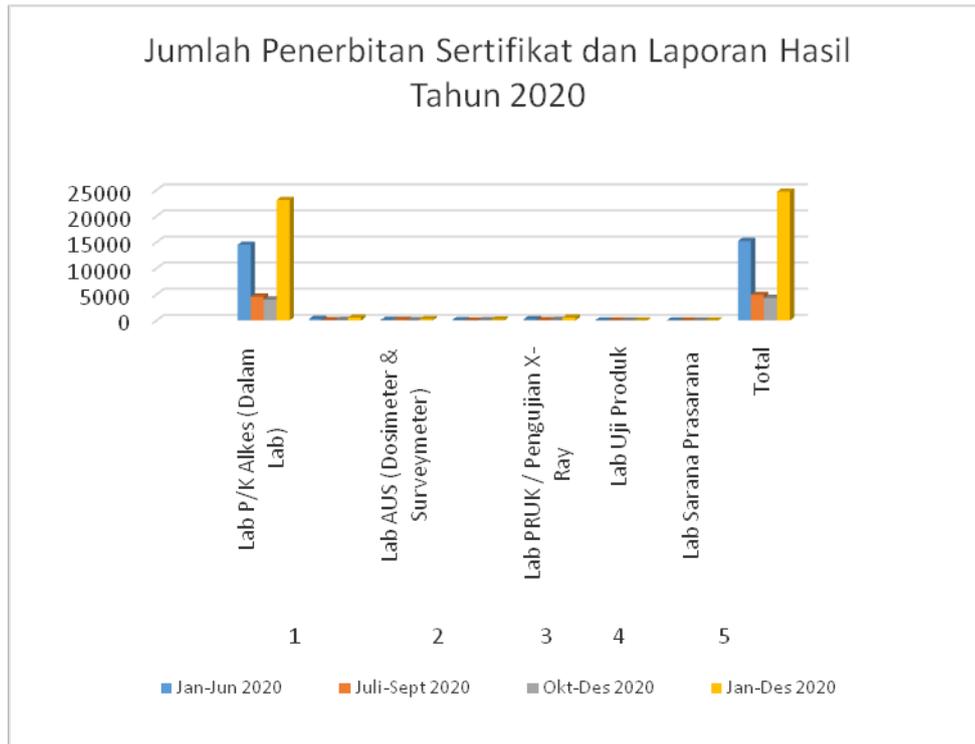
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2020	2020
KPI.8	Jumlah Sertifikat /Laporan Hasil yang diterbitkan	Kasi Pelayanan Teknis	35000	43238

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 35000 dan realisasi kinerja sebesar 43238 (124%) maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **sangat baik.**

Jumlah Penerbitan Sertifikat dan Laporan Hasil
Periode Jan - Des 2020

No	Uraian	Jan-Jun 2020	Juli-Sept 2020	Okt-Des 2020	Jan-Des 2020
1	Lab P/K Alkes (Dalam Lab)	14532	4567	4015	23114
		302	91	101	566
2	Lab AUS (Dosimeter & Surveymeter)	102	133	37	272
		62	24	61	159
3	Lab PRUK / Pengujian X-Ray	234	91	96	563
4	Lab Uji Produk	-	4	22	26
5	Lab Sarana Prasarana	-	-	5	14
	Total	15232	4910	4337	24714

Uraian	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		Juli-Sept	Jan-Sept	Okt-Des
Lab PRUK	Jan-Jun 2020	2020	2020	2020
Uji Kesesuaian			117	23
TLD	7487	4188	11675	4555
FB	995	372	1367	561
Total	8482	4560	13159	5139



2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KPI.8	Jumlah Sertifikat /Laporan Hasil yang diterbitkan	Kasi Pelayanan Teknis	88%	90%	35000	76,92%	79%	43012	50%	88%	124%

Capaian indikator kinerja tahun 2020 sebesar 124%, tahun 2019 sebesar 88%, maka dinyatakan ada kenaikan kinerja sebesar 44%. Kenaikan dikarenakan adanya perubahan definisi operasional dari indikator kinerja pada Renstra BPFK Jakarta periode 2020-2024.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	KPI	PIC	TARGET					CAPAIAN	REALISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
KPI.8	Jumlah Sertifikat /Laporan Hasil yang diterbitkan	Kasi Pelayanan Teknis	35000	40000	42000	45000	50000	43012	124%

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah capaian tahun ini sebesar 43012 (124%) dan tahun 2024 sebesar 50.000.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan ataupun Standar Nasional yang bisa dibandingkan, hanya menganalisa data penerbitan sertifikat sesuai standar pelayanan minimal BPFK Jakarta.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

5.a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

1. Perubahan Definisi Operasional pada Renstra BPFK Jakarta 2020-2024.

2. Sebagian pekerjaan yang dilakukan di akhir tahun 2019, sertifikat/laporan Hasil baru diterbitkan pada ditahun 2020 dikarenakan Laporan Hasil dari laboratorium/intstalasi baru diserahkan ke yantek pada awal tahun 2020.
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Seksi Pelayanan Teknis melakukan koordinasi secara periodik dengan Laboratorium dalam penggunaan aplikasi SIMPLE sehingga petugas seksi Pelayanan Teknis tidak perlu ke laboratorium lagi untuk meminta jadwal pelayanan dan melakukan input data laporan hasil.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
Belum terealisasinya usul pemukthiran aplikasi SIMPLE yang terkoneksi antara penerbitan sertifikat di Seksi Pelayanan Teknis dan laporan Hasil dari laboratorium

KPI.9 Pendapatan PNBPN

Adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar Rp8.000.000.000,-.

**Tabel KPI.9
Pendapatan PNB**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2020	2020
KPI.9	Pendapatan PNB	Kasubag Tata Usaha	8 M	9 M

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp8.000.000.000 dan realisasi kinerja tahun ini sebesar Rp9.028.708.420,- maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **Sangat Baik**.

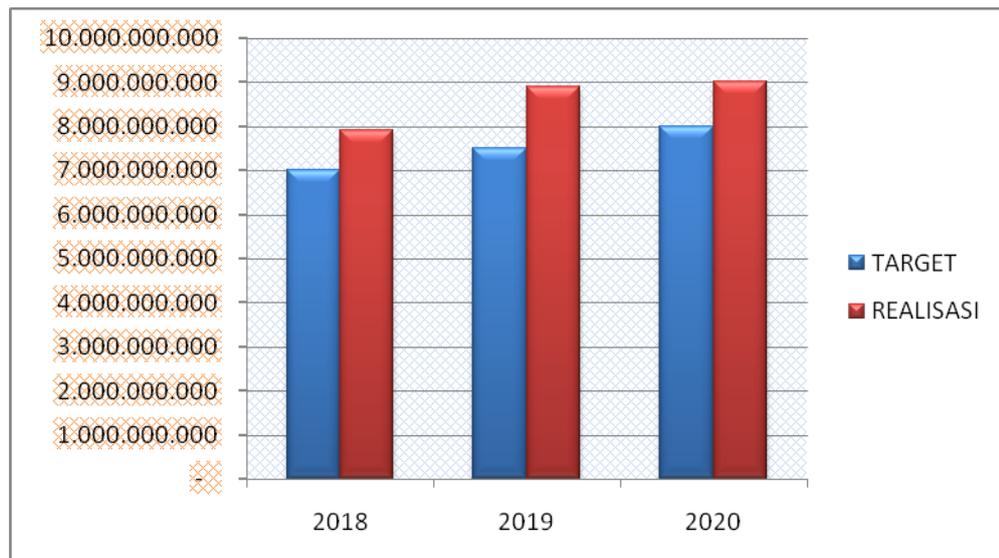
Pendapatan PNB BPFK Jakarta Tahun 2020 di dapat dari layanan :

No	Rincian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Lab. AUR / AUS	200.672.000
2	Lab. ALKES	5.356.361.420
3	Lab. Uji Kesesuaian X-Ray:	621.367.000
4	Lab. Uji Produk	38.640.000
5	Lab. Pemantauan Dosis Personal	2.577.300.000
6	Lab. Sarana dan Prasarana	144.026.000
7	Bimbingan Teknik, Penelitian, dan PKL/Magang :	20.550.000
8	Uji Profisiensi	69.792.000
	Jumlah	9.028.708.420

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KPI.9	Pendapatan PNB	Kasubag Tata Usaha	7M	7.5M	8M	7.9	8.8	9 M	113%	118,5%	112,86%

Garfik KPI.9 Pendapatan PNB



Jika realisasi indikator kinerja ini dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 sebesar 112,86%, Tahun 2019 sebesar 118,5% dan Tahun 2018 sebesar 113%, maka dapat dinyatakan ada perkembangan kinerja yang meningkat.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah capaian tahun ini sebesar 9 M dan tahun 2020 sebesar 9 M, sehingga terjadi kenaikan sebesar 95%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 358/KMK.06/2002 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Jika dibandingkan dengan Standar Nasional tidak ada.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan :

1. Adanya koordinasi yang baik dari semua pihak terkait

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Adanya tim PNBPN yang bertugas diantaranya melakukan followup kepada pelanggan/customer dalam hal proses atau persyaratan pembayaran.

2. Alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2020 sebesar Rp6.867.200.000,- terealisasi sebesar Rp5.156.015.262,- atau 75,08%.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Melakukan Peningkatan pelayanan pengujian/kalibrasi dan proteksi radiasi agar mendorong pendapatan PNBPN lebih besar.

KPI.10 Pemenuhan LAKIP

Pemenuhan LAKIP adalah Menggambarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun.

Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 95.

**Tabel KPI.10
Pemenuhan LAKIP**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2020	2020
KPI.10	Pemenuhan LAKIP	Kasubag Tata Usaha	95	0

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan tahun ini sebesar 95 dan realisasi kinerja tahun ini belum ada review.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KPI.10	Pemenuhan LAKIP	Kasubag Tata Usaha	97.50	97.50	95	97.25	97.25		99,74%	99,74%	

Jika realisasi indikator kinerja ini di bandingkan dengan capaian Tahun 2020 sebesar %, Tahun 2019 sebesar 97,25% dan Tahun 2018 97,25%, maka dapat dinyatakan ada perkembangan kinerja yang meningkat dengan kategori "AA".

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah capaian tahun ini sebesar 0, tahun 2020 sebesar 97,5%, belum bisa dibandingkan karena belum dilakukan review.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - Analisa penyebab penurunan capaian target :
 1. Perubahan metode penilaian SAKIP semula mengacu pada Peraturan Menteri PAN/RB No.20 Tahun 2013 di rubah mengacu pada Peraturan Menteri PAN/RB No. 12 Tahun 2015.
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 1. Pembahasan dan Penyusunan LAKIP dilakukan melalui pertemuan atau rapat yang melibatkan penanggungjawab/PIC pelaksana kegiatan, peserta aktif dan penunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IKU/KPI.
 2. Alokasi anggaran dalam Dipa sebesar Rp24.600.000,- terealisasi sebesar Rp23.285.950,- atau 94,66%.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Pelatihan dan pendidikan atau Bimtek Laporan kinerja (LAK) di Kementerian Keuangan.

KPI.11 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Target yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar 100%.

Tabel Rincian alokasi anggaran :

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN		
		RM	PNBP	TOTAL
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan			
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	30.110.250.000,-	6.867.200.000,-	36.977.450.000,-
1.	Gedung Layanan	2.006.350.000,-	-	2.006.350.000,-
2.	Alat Kesehatan	3.338.148.000,-	-	3.338.148.000,-
3.	Layanan Operasional UPT Non BLU	-	6.338.062.000,-	6.338.062.000,-
4.	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	-	325.156.000,-	325.156.000,-
5.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.655.502.000,-	203.982.000,-	3.859.484.000,-
6.	Layanan Perkantoran	21.110.250.000,-	-	21.110.250.000,-

**Tabel KPI.11
Realisasi Anggaran**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2020	2020
KPI.11	Realisasi anggaran	Kasubag Tata Usaha	100%	79,40%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 79,40%, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **cukup**, berikut rinciannya :

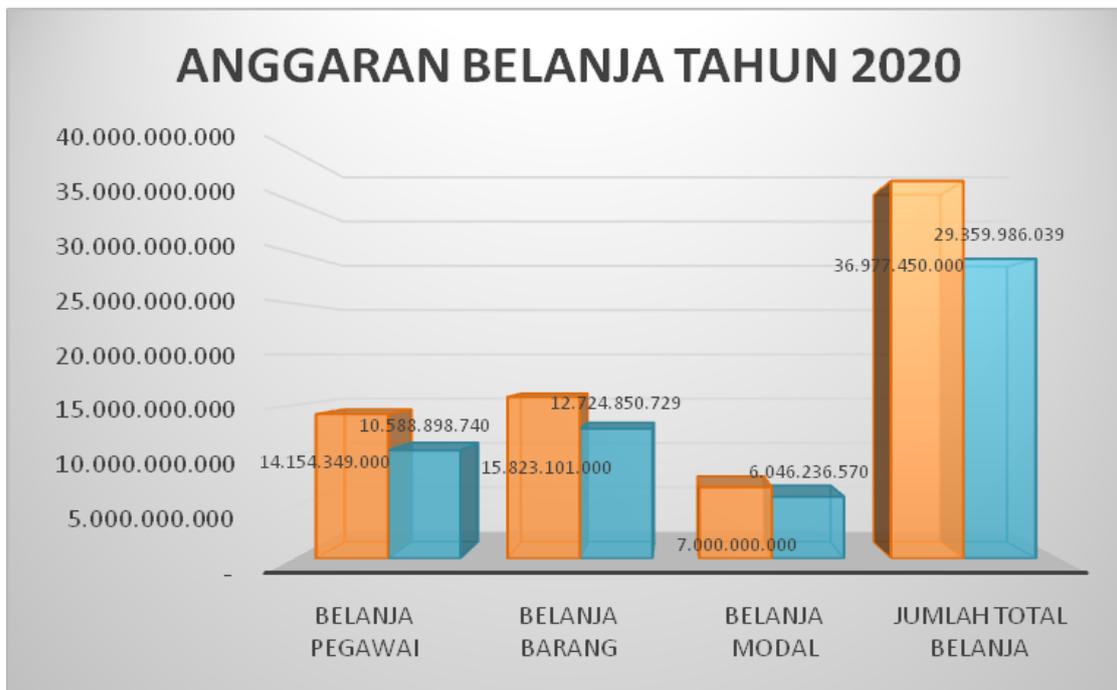
RINCIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	14.154.349.000	10.588.898.740	74,81%
Belanja Barang	15.823.101.000	12.724.850.729	80,42%
Belanja Modal	7.000.000.000	6.046.236.570	86,37%
JUMLAH	36.977.450.000	29.359.986.039	79,40%

Realisasi anggaran yang mendukung langsung Indikator Keluaran Program Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yaitu sebesar 79,40% dari total anggaran BPFK Jakarta sebesar Rp36.977.450.000,-. Dengan rincian sebagai berikut :

Table alokasi dan realisasi anggaran per bagian/ Seksi

PEMBAGIAN PER BAGIAN/SEKSI	PAGU	REALISASI	%
Sub Bag Tata Usaha	23.205.886.000	18.043.139.424	77,75
Seksi Tata Operasional	2.475.720.000	1.968.952.838	79,53
Seksi Bimbingan Teknis & Kemitraan	2.134.474.000	1.655.569.721	77,56
Seksi Pelayanan Teknis	729.491.000	589.080.700	80,75
Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan	928.386.000	616.367.364	66,39
Pengadaan Barang/Jasa	7.503.493.000	6.494.475.995	86,55
Jumlah	36.977.450.000	29.367.586.042	79,40

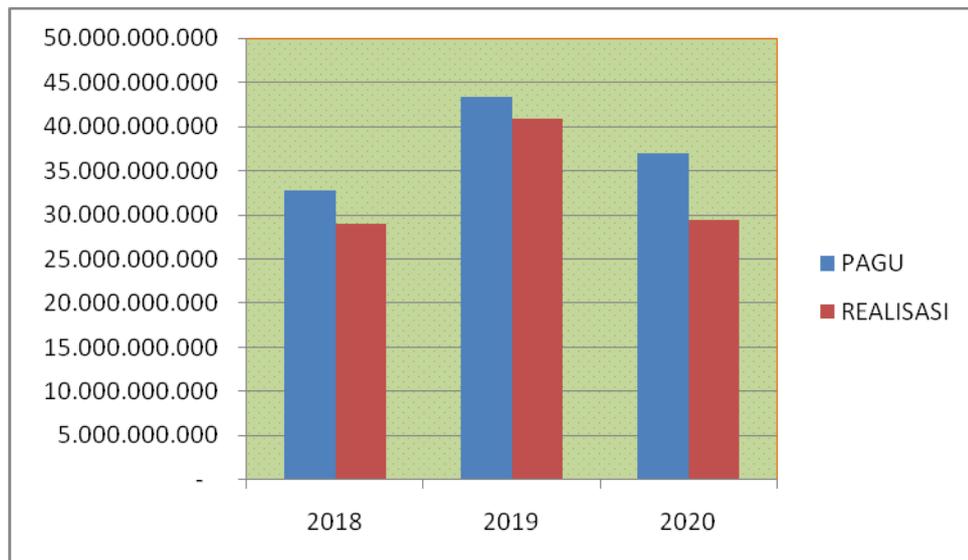
Grafik pagu dan realisasi anggaran Tahun 2020



2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
KPI. 11	Realisasi anggaran	Kasubag Tata Usaha	100%	100%	100%	89%	94%	79,42%	89%	94,25%	79,40%

Grafik, Realisasi anggaran dan perbandingan 2018,2019,2020



Jika realisasi indikator ini dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 sebesar 79,40%, Tahun 2019 sebesar 94,25% dan Tahun 2018 sebesar 89%, maka dapat dinyatakan **terjadi penurunan sangat signifikan** dari tahun sebelumnya.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah sebesar 100% capaian tahun ini sebesar 94,25%, sehingga terjadi kenaikan sebesar 94,25%.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Untuk kegiatan Realisasi Anggaran tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada aturan dari Pemerintah.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

5.a. Analisa penyebab kegagalan capaian :

1. Pelaksanakan kegiatan tersendat karena adanya wabah virus Covid-19 sehingga kegiatan efektif pada Semester I TA 2020.
2. Realisasi Belanja Pegawai tidak tercapai karena ada pembayaran untuk tunjangan bahaya radiasi untuk non fungsional tidak terealisasi
3. Ada kegiatan dibagian Pelayanan Teknis yang tidak terlaksana karena kurangnya personil .

5.b. Alternatif solusi yang dilakukan :

1. Melakukan evaluasi terhadap usulan belanja pegawai lebih detail dan berkoordinasi dengan bagian kepegawaian BPFK Jakarta
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

- a. Pelaksanaan kegiatan harus berazaskan kepada kewajaran, transparansi dan efisiensi serta pembiayaan mengacu pada standar biaya umum (SBU).
- b. Alokasi anggaran dalam Dipa sebesar Rp281.123.000,- dan realisasi sebesar Rp261.002.200,- atau 92,84%.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pelatihan dan pendidikan perencanaan anggaran di Kementerian keuangan atau Kemenpan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai pelaksanaan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BPFK Jakarta yang merupakan awal dari Renstra BPFK Jakarta 2020-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun 2020 secara umum **berhasil** mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta.

Pencapaian pada tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta.

Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi program yang mendukung terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, dengan melakukan inovasi diharapkan pencapaian indikator kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yang ada pada Renstra Kemkes 2025-2029 dapat tercapai.

Selain melakukan inovasi, yang akan dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mengoptimalkan sistem informasi yang saling terintegrasi baik di internal maupun eksternal Balai

Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, diharapkan dengan adanya Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan untuk mencapai target kinerja.

Lampiran – lampiran :
Perjanjian Kinerja

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. J. Prastowo Nugroho, MHA.

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

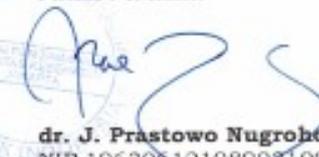
Jakarta, November 2019

✓ Pihak Kedua, 

dr. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS
NIP 196108201988121001

Pihak Pertama




dr. J. Prastowo Nugroho, MHA.
NIP 196306121989031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2020
(1)	(2)	(3)		(5)
1	Terwujudnya Kepuasan Pelanggan	1.1	Indeks Kepuasan Pelanggan	
			- Internal	68 %
			- Eksternal	74 %
2	Peningkatan Cakupan Jenis Pelayanan SPA yang Terakreditasi	2.1	Jumlah Ruang Lingkup Pelayanan	129
		2.2	Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi	54
3	Peningkatan Ketercapaian Standar Pelayanan Minimum	3.1	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	32
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana BPFK Jakarta	4.1	Tingkat Keandalan Alat Ukur dan Kalibrator	55
5	Peningkatan Pembinaan Teknis Institusi Penguji Pemerintah dan Swasta	5.1	Persentase Peserta Uji yang Memenuhi Persyaratan	50 %
6	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM sesuai Visi dan Misi BPFK Jakarta	6.1	Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM	65 %
7	Peningkatan Pendapatan Melalui Produktifitas Pelayanan	7.1	Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan	35000

8	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Melalui Badan Layanan Umum	8.1	Pendapatan PNBP	8 M
		8.2	Pemenuhan LAKIP	95
		8.3	Realisasi Anggaran	100 %

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Anggaran

Rp 36.977.450.000,-

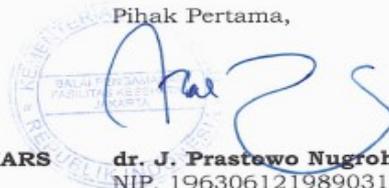
Jakarta, November 2019

✓ Pihak Kedua, ✓



dr. Bambang Wibowo, Sp. OG(K), MARS
NIP. 196108201988121001

Pihak Pertama,



dr. J. Prastowo Nugroho, MHA.
NIP. 196306121989031003

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA BPFK JAKARTA

NO	KPI	PIC	BASELINE	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
KPI.1	Indeks kepuasan pelanggan a. internal b. Eksternal	Taop	68 74	68	68,5	69	69,5	70
				125	129	133	137	141
KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Taop	52	54	58	62	66	70
KPI.3	Penambahan ruang lingkup Akreditasi	TU & Taop	32	30	33	36	39	42
KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Taop	50	55	60	65	70	75
KPI.5	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	Bimtek & Taop	78	50	55	60	65	70
KPI.6	Persentase peserta uji Profisiensi yg memenuhi persyaratan	Bimtek & TU	50	65	75	85	95	100
KPI.7	Persentase pemenuhan kompetensi SDM	Yantek	30,02	35	40	42	45	50
KPI.8	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan	Tata Usaha	8,8 M	9,5 M	10 M	11 M	12,5 M	14 M
KPI.9	Pendapatan PNBP		97,5	95	95	95	95	95
KPI.10	Pemenuhan LAKIP		94	100	100	100	100	100
KPI.11	Realisasi anggaran							



Jakarta, Maret 2020
 Kepala BPFK Jakarta
 dr. J. Prastowo Nugroho, MHA.
 NIP. 196306121989031003

2. Matrik Indikator Kinerja Utama

3. Laporan realisasi anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 552687 BPKP JAKARTA
JENIS KEMUNGKINAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	2020						2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL ANGG.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH										
A.1	PENERIMAAN NEGARA	0,000,000,000	9,261,467,525	1,261,467,525	119,77	7,500,000,000	8,695,000,400	1,395,665,400	116,61		
A.1.1	Perorangan Perorangan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
A.1.1.a	Perorangan Negara Bukan Pajak	8,000,000,000	5,291,467,525	1,261,467,525	115,77	7,500,000,000	8,895,865,400	1,390,000,400	118,61		
A.1.1.b	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
A.1.2	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	8,000,000,000	9,261,467,525	1,261,467,525	115,77	7,500,000,000	8,895,865,400	1,395,665,400	118,61		
B	BELANJA NEGARA										
B.1	Rujukan Umum	36,977,450,000	28,309,086,039	7,617,463,961	79,40	43,372,625,000	40,810,947,978	2,561,677,029	94,09		
B.1.1	Belanja Pegawai	14,154,340,000	10,688,690,749	3,565,650,250	74,81	12,322,780,000	12,113,467,394	2,09,372,610	99,30		
B.1.1.b	Belanja Barang	15,021,101,000	12,724,650,729	3,098,959,271	80,42	15,232,830,000	13,523,211,147	1,709,618,853	89,79		
B.1.1.c	Belanja Modal	7,000,000,000	8,095,236,570	993,783,490	98,37	19,817,015,000	15,174,329,440	642,985,550	91,84		
B.1.1.d	Pemertanian Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.2	Piutang dan Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.2.a	Bantuan Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
C	JUMLAH BELANJA	36,977,450,000	28,309,086,039	7,617,463,961	79,40	43,372,625,000	40,810,947,978	2,561,677,029	94,09		
C.1	PEMBAYARAN										
C.1.1	PEMBAYARAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
C.1.1	Pembelian Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
ESLON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 552887 BPK JAKARTA
JENIS KEMUNGKINAN : KD KANTOR DAERAH

Kepala Unit :
Tanggung Jawab :
Materi :
Tanggal :
Revisi :
No. :
Halaman :
Tipe :
No. :
Halaman :
Tipe :

No	URAIAN	2020						2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
C.12	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
C.II.1	Perbankan Prigmen Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
C.II.1	Pembayaran Cetak Pinxk Uang Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		

Jakarta, 31 Desember 2020

Kepala Kantor

Dr. J. Prastowo Nugroho, M.H.A.

NIP. 196306121969031003



4. SK LAKIP



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) JAKARTA**

Jl. Percetakan Negara No. 23 A Jakarta Pusat 10570
Telp. : (021) 4240406, 42882249, Fax. : (021) 4244168, 42882237
Email.: kontak@bpfkjakarta.or.id - Website. : http://bpfkjakarta.or.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA
NOMOR : PS.03.01/XLVIII.1/0305/2018**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DAN PENETAPAN KINERJA
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**

KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan yang perlu dipertanggungjawabkan;
b. bahwa Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Menteri Kesehatan dan menyusun Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta ;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.530/Menkes/Per/IV/2007 tanggal, 27 April 2007 dan perubahannya No. No. 2351/Menkes/Per/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perecepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/1568/12 tanggal, 28 Agustus 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim adalah sebagai berikut :

Pelindung : Kepala BPFK Jakarta

Penanggung Jawab : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota :
1. Kepala Seksi Tata Operasional
2. Kepala Seksi Pelayanan Teknis
3. Kepala Seksi Kemitraan dan Bimtek

Sekretariat :
1. Ka. Instalasi Lab. Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan
2. Ka. Instalasi Lab. Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian X-Ray
3. Ka. Instalasi Lab. Pengujian/ Kalibrasi/ Inspeksi Sarana Prasarana (SP)
4. Ka. Instalasi Lab. Kalibrasi Alat Ukur Standar dan Kalibrator Alat Kesehatan
5. Meilany Sianturi, SAP (Tata Usaha)
6. Yeni Utirah Kusdiana, SE. (Tata Usaha)

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data atau bahan yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
2. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta sebagai pertanggungjawaban Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
3. Menyusun Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
4. Melakukan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
5. Menyusun laporan berkala BPFK Jakarta (semesteran dan tahunan)
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja bertanggung jawab kepada kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dibebankan kepada DIPA Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dan perubahan terkait kebijakan atau regulasi yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 Januari 2018



**KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS
KESEHATAN JAKARTA,**

Dr. J. Prastowo Nugroho, MHA
NIP. 196306121989031003

